
KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP EKONOMI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008-2012

Ary Widiyanto dan Aris Sudomo

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry, Ciamis
E-mail: ary_301080@yahoo.co.id

ABSTRAK

Studi ini dilaksanakan untuk mengetahui peran sektor kehutanan bagi ekonomi Kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan adalah *Location Quotient (LQ) analysis* dan *Klassen Typology analysis*. Data yang dikumpulkan adalah pendapatan daerah Kabupaten Purworejo dan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sektor kehutanan adalah sektor yang penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Purworejo rata-rata adalah 1,6%. *LQ analysis* mengindikasikan bahwa sektor kehutanan menjadi sektor basis pada periode tersebut, dengan nilai LQ diatas 1 (satu). Nilai *income multiplier effect* sektor kehutanan pada tahun 2012 adalah 64,74. Hasil analisis *Klassen Typology* menunjukkan sektor kehutanan masuk dalam kuadran 1, atau sektor maju. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo lebih besar dari pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: sektor kehutanan, *LQ analysis*, *Klassen typology*, ekonomi regional

PENDAHULUAN

Hutan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Manfaat utama hutan diantaranya manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat ekonomi dari hutan (termasuk hutan rakyat) antara lain berupa penjualan produk hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayu. Disamping itu, hutan rakyat juga memberikan manfaat tidak langsung seperti aspek lingkungan berupa iklim mikro, mengatur dan menyimpan air, penyerapan karbon, perlindungan tanah dan Daerah Aliran Sungai (DAS), mengurangi polusi udara dan menjaga hara tanah.

Kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menuntut setiap daerah agar dapat mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya. Tujuan dari pengembangan daerah adalah mengembangkan struktur perekonomian yang baik dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang

tinggi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap daerah dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Produk hasil hutan kayu di kabupaten Purworejo dihasilkan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan dan hutan rakyat. Komoditas kayu yang dihasilkan oleh KPH Kedu Selatan adalah jati, pinus, dan mahoni, sedangkan komoditas kayu yang dihasilkan hutan rakyat adalah jati, sengon, mahoni, waru, sonokeling, sungkai, dan rimba campur. Berdasarkan data produksi kayu bulat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Purworejo, sejak tahun 2010 hingga 2013 produksi kayu bulat paling besar di kabupaten Purworejo berasal dari hutan rakyat.

Pemerintah kabupaten Purworejo dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 menyebutkan permasalahan utama sektor kehutanan meliputi gangguan hutan dan perambahan hutan, pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan lindung yang belum optimal, konservasi hutan belum optimal, dan masih rendahnya pendapatan masyarakat sekitar hutan. Sektor kehutanan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi kabupaten Purworejo. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas hutan, mengembangkan aneka usaha kehutanan, serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan.

Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu posisi sektor kehutanan dalam perkenonomian regional Kabupaten Purworejo. Hal ini dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan terkait sektor kehutanan dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan kehutanan dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah menghitung kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi kabupaten Purworejo.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015 di kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Pengumpulan Data

Data utama dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Purworejo dan Propinsi Jawa Tengah yang digunakan meliputi; 1) nilai output dari tiap sektor di, 2) total output untuk seluruh sektor, 3) pertumbuhan output untuk tiap sektor. Data dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Purworejo dan Propinsi Jawa Tengah.

Analisis Data

Analisis data menggunakan *Location Quotient (LQ) analysis* dimana ekonomi regional di Kabupaten Purworejo dianalisis dengan ekonomi Propinsi Jawa Tengah sebagai daerah yang luas cakupannya (*reference area*). Kemudian, *Klassen Typology* digunakan untuk menentukan posisi sektor kehutanan dalam

tahapan pembangunan ekonomi Kabupaten Purworejo. Dalam metode ini, akan diketahui sektor kehutanan termasuk dalam kategori sektor yang mana, apakah maju, berkembang, tidak berkembang, atau terbelakang.

1. Location Quotient (LQ) Analysis

LQ Analysis digunakan untuk mengkategorikan sektor kehutanan ke dalam sektor utama (*basic sector*) atau bukan sektor utama (*non basic sector*) dalam sistem ekonomi Kabupaten Purworejo. *Basic sector* diindikasikan dengan nilai LQ (*LQ value*) lebih dari 1 (satu) dan *non basic sector* diindikasikan dengan nilai LQ (*LQ value*) kurang dari 1 (satu). Rumus LQ yang digunakan pada studi ini mengacu pada Richardson (1985) dan Kuncoro (2004). Rumus yang digunakan adalah;

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Pi/Pt}$$

Vi = PDRB sektor kehutanan di kabupaten Purworejo

Vt = PDRB sektor kehutanan di propinsi Jawa Tengah

Pi = total PDRB di kabupaten Purworejo

Pt = total PDRB di Provinsi JawaTengah

2. Klassen Typology

Menurut Sjafrizal (2008), Klassen Typology mengklasifikasikan fase pembangunan ekonomi menjadi empat grup dan membagi empat grup tersebut dalam empat kuadran. Klasifikasi sektor ditentukan oleh dua faktor: kontribusi sektor terhadap PDRB (Ys) dan tingkat pertumbuhan sektor tersebut (Rs). Tabel 1 menunjukkan klasifikasi sektor berdasarkan Klassen typology. Kuadran I menunjukkan sektor maju. Sektor ini mensyaratkan dua hal: 1) Tingkat pertumbuhan sektor kehutanan di Kabupaten Purworejo (Rsi) harus sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan sektor kehutanan di area yang lebih besar/luas (Propinsi Jateng) ($Rsi \geq Rsn$), dan 2) Nilai kontribusi sektor kehutanan di Kabupaten Purworejo (Ysi) harus sama atau lebih besar dari nilai kontribusi sektor kehutanan di area yang lebih besar/luas (Propinsi Jateng) ($Ysi \geq Ysn$).

Kuadran II menunjukan sektor yang tidak berkembang (*stagnant sektor*), yang diindikasikan dengan: Rsi harus sama atau lebih besar Rsn ($Rsi \geq Rsn$); Ysi harus kurang dari Ysn ($Ysi < Ysn$). Kuadran III mengindikasikan sektor berkembang, dengan prasyarat Rsi kurang dari Rsn ($Rsi < Rsn$); dan Ysi sama dengan atau lebih dari Ysn ($Ysi \geq Ysn$). Terakhir kuadran IV merupakan sektor terbelakang, ditunjukan dengan: Rsi kurang dari Rsn ($Rsi < Rsn$); dan Ysi kurang dari Ysn ($Ysi < Ysn$). Untuk lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Klasifikasi sektor berdasarkan Klassen typology

Tingkat Pertumbuhan	Sektor	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB	
		Ysi \geq Ysn	Ysi < Ysn
Rsi \geq Rsn	I	Sektor Maju	III Sektor Berkembang
Rsi < Rsn	II	Sektor Tidak Berkembang	IV Sektor Terbelakang

Keterangan

Rsi = Tingkat pertumbuhan sektor kehutanan dalam PDRB Kabupaten Purworejo

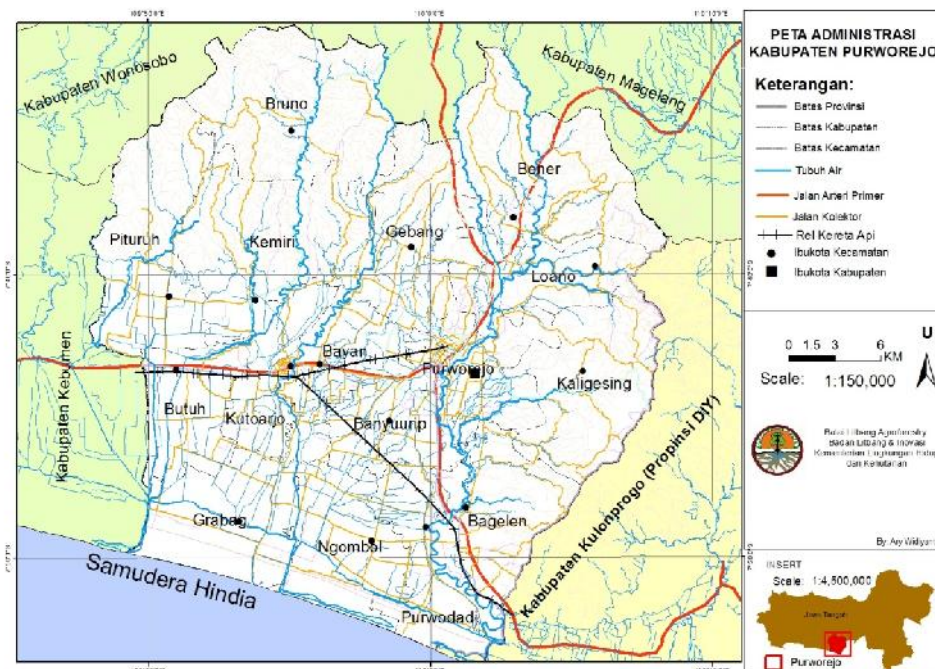
Rsn = Tingkat pertumbuhan sektor kehutanan dalam PDRB Propinsi Jawa Tengah

Ysi = Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Purworejo

Ysn = Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah

INFORMASI UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Purworejo, salah satu dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 7°32" hingga 7°54" Lintang Selatan dan 109°47'28" sampai 110°8'20" Bujur Timur. Bagian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang, tetapi bagian Southside dibatasi oleh Samudera Indonesia. Bagian sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo (Provinsi Yogyakarta) dan bagian barat dibatasi oleh Kabupaten Kebumen (Pemda Purworejo, 2013).



Gambar1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo

Berdasarkan iklim Oldeman, Kabupaten Purworejo termasuk kelompok iklim B2, dengan jumlah bulan basah dan bulan kering, masing-masing 2 dan 8. Sistem pertanian ini cocok untuk 2 kali masa tanam sawah dan tanaman palawija pada musim kemarau. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, Kabupaten Purworejo memiliki tipe iklim C, dengan rata-rata dari rata-rata bulan kering dan bulan basah, masing-masing 4,4 dan 7,6. Ini berarti kondisi iklim di Kabupaten Purworejo termasuk wilayah basah, dimana pada musim kemarau pohon di hutan menggugurkan daun.

Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.034,82 km². Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72.854,80 Ha atau 70,40% dan tanah sawah seluas 30.626,97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10.116,50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51,598,14 Ha berupa tegal/kebun/ladang/huma, 6.857,88 Ha berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27.677,14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2.949,83 Ha.

Luas hutan rakyat di Kabupaten Purworejo adalah 25.895 Ha (BPS Kabupaten Purworejo, 2015), yang masuk dalam kategori penggunaan lahan kebun/ladang. Sebaran hutan rakyat meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo seperti Kecamatan Bruno, Pituruh, Kemiri, Bener, Gebang, Kaligesing, dan Loano. Jumlah penduduk Purworejo pada tahun 2015 adalah 710.435 (BPS Kabupaten Purworejo, 2015), dengan demikian rata-rata kepemilikan hutan rakyat adalah 0,036 ha per orang atau 0,12 per kepala keluarga (KK). Hutan rakyat di Purworejo didominasi oleh jenis jati (*Tectona grandis*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan sonokeling (*Dalbergia latifolia*, Roxb). .

Secara umum Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 3 wilayah dengan jenis tanah yang berbeda, yaitu : 1) Jenis tanah alluvial dengan luas sekitar 31,9% dari total wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi, 2) Jenis tanah Regosol mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi dengan luas sekitar 5,03%, dan 3) Jenis tanah latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan luas sekitar 63,07%, dengan produktifitas sedang hingga tinggi (Pemda Kabupaten Purworejo, 2013).

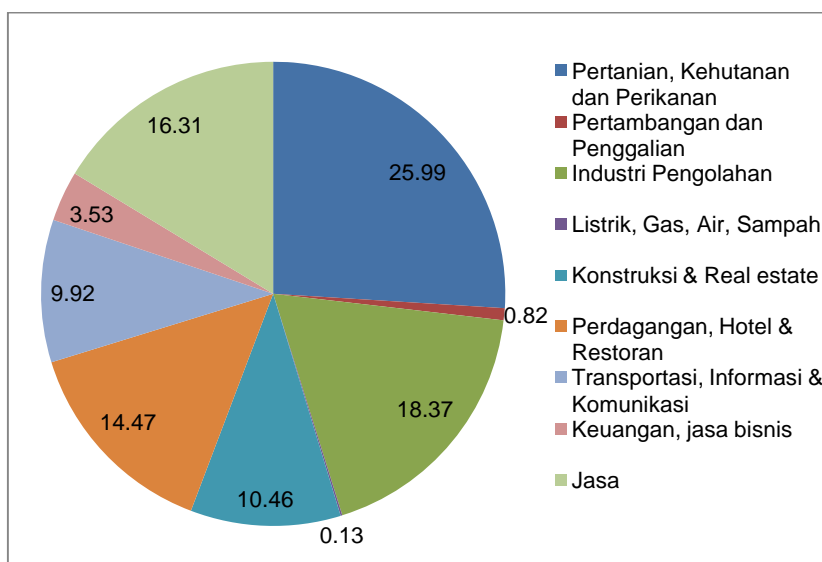
HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator aktifitas ekonomi suatu wilayah pada periode waktu tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto. PDRB Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi ekonomi makro wilayah ini dalam periode waktu tertentu. Sektor-sektor ekonomi yang dihitung dalam Kabupaten Purworejo dibagi dalam beberapa kategori, meliputi; (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas, dan air, (5) Konstruksi, (6)

Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Transportasi dan komunikasi, (8) Lembaga keuangan, sewa, dan jasa bisnis, dan (9) Jasa-jasa.

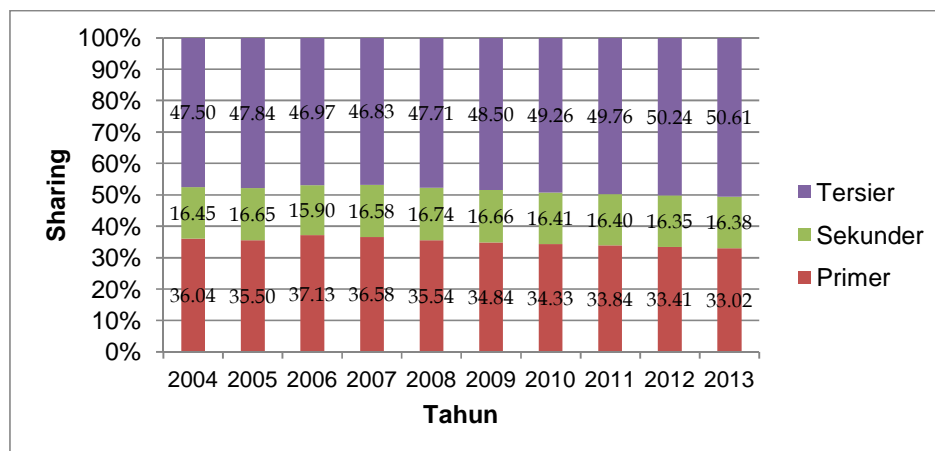
PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2015 menurut harga berlaku adalah sebesar 13.837,88 Milyar Rupiah, dan menurut harga konstan adalah sebesar 10.841,66 Milyar Rupiah. Perekonomian Kabupaten Purworejo tahun 2015 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,99 persen. Hal ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB. Selama tiga tahun terakhir (2013 – 2015), peranan sektor pertanian tidak mengalami pergeseran secara berarti (BPS Kabupaten Purworejo, 2013-2015).



Gambar 2. Kontribusi tiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2015

Struktur Ekonomi Kabupaten

Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, jasa, dan industri pengolahan menjadi tulang punggung ekonomi Purworejo pada tahun 2015. Ketiga sektor ini berkontribusi pada sekitar 60,7% dari total ekonomi Purworejo. Industri pengolahan menggeser sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pada tahun 2013 masuk tiga besar contributor utama. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi daerah, dengan kontribusi sekitar 26%. Meskipun demikian, pada periode 2004-2013 terlihat bahwa *sharing* sektor primer pada PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun (Gambar 3).



Gambar 3. Kontribusi setiap Sektor terhadap PDRB Pada Harga Konstan Kabupaten Purworejo 2004 - 2013

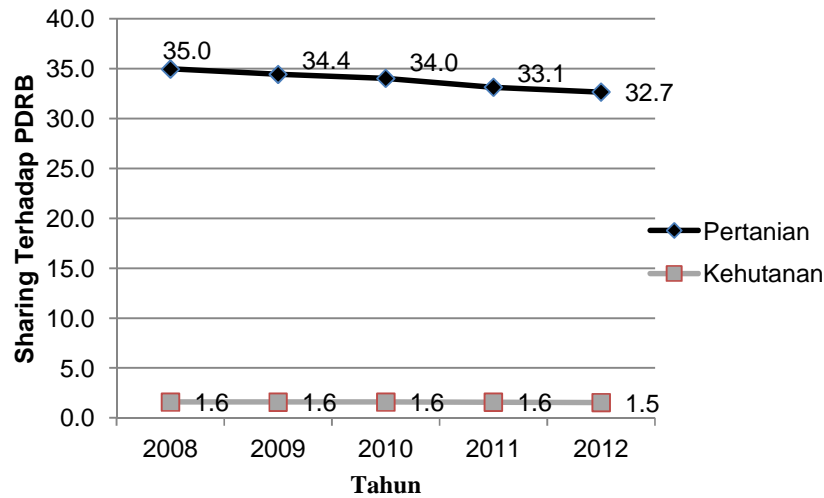
Dalam periode tersebut sektor tersier meningkat sekitar 3%, mengurangi kontribusi sektor primer yang turun dengan jumlah yang hampir sama. Sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa. Sektor sekunder cenderung stagnan pada 10 tahun tersebut dengan *sharing* sekitar 16%. Sektor ini meliputi industry pengolahan, listrik, gasa dan air, dan konstruksi.

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Besarnya kontribusi sub sektor kehutanan di Kabupaten Purworejo dapat diketahui dengan menghitung distribusi PDRB, nilai *location quotient* (LQ), dan nilai *multiplier effect*. Data yang digunakan adalah data PDRB kabupaten Purworejo menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000. Dari lima sub sektor pada sektor pertanian, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor tanaman pangan, sementara sektor kehutanan kontribusinya kecil yaitu berkisar sekitar 1,6 %.

Nilai kontribusi sektor kehutanan di Kabupaten Purworejo ini lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah administrative di atasnya. Jawa Tengah misalnya, kontribusi sektor kehutanan hanya sekitar 0.35%. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap ekonomi Indonesia berkisar 0.92% (Bappenas, 2017).

Hal ini disebabkan oleh perhitungan kontribusi sub sektor kehutanan dalam PDRB hanya memperhitungkan manfaat *tangible* hutan meliputi komoditi kayu dan bambu. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB kabupaten Purworejo hanya sedikit berfluktuasi selama tahun 2008-2012 (Gambar 4). Sementara itu, sektor pertanian cenderung turun selama periode waktu yang sama, dengan total penurunan sekitar 3 % jika dibandingkan tahun awal perhitungan (2008).



Gambar 4. Kontribusi sektor kehutanan dan pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 Kabupaten Purworejo pada 2008-2012

Sektor Basis

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada periode 2008 sampai 2012 LQ value untuk sektor kehutanan adalah lebih dari 1 (satu) bahkan merupakan terbesar (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kehutanan sangat penting bagi ekonomi kabupaten Purworejo. Sebagai sektor basis, kehutanan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah, dengan cara menjual output ke daerah lain baik dalam propinsi yang sama atau luar propinsi Jawa Tengah. Sempat menurun pada 2010, nilai LQ sektor kehutanan di Kabupaten Purworejo meningkat kembali 0,2 poin jika dibandingkan tahun awal perhitungan (2008). Tabel 2 menunjukkan nilai LQ untuk seluruh sektor di Kabupaten Purworejo, selama periode 2008-2012.

Tabel 2. Nilai LQ untuk seluruh sektor di Kabupaten Purworejo (2008-2012)

Sektor	Nilai LQ Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Pertanian</i>	1.67	1.68	1.71	1.75	1.76
<i>Kehutanan</i>	4.54	4.59	4.48	4.56	4.74
<i>Pertambangan dan Galian</i>	1.87	1.77	1.73	1.72	1.66
<i>Industri Pengolahan</i>	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35
<i>Listrik, Gas, dan Air Bersih</i>	0.57	0.58	0.57	0.57	0.57
<i>Bangunan/Konstruksi</i>	0.89	0.89	0.88	0.88	0.86
<i>Perdagangan, Hotel, Restoran</i>	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74
<i>Angkutan dan Komunikasi</i>	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10
<i>Bank, Lembaga Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan</i>	1.45	1.46	1.48	1.50	1.46
<i>Jasa-jasa</i>	1.71	1.76	1.77	1.77	1.76

Nilai LQ ini hampir sama dengan nilai LQ sektor kehutanan di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 4,85 pada tahun 2008 (Rahmat et al, 2012). Demikian juga dengan hasil penelitian Wiguna (2014) di Kabupaten Sumedang, dimana nilai LQ sektor kehutanan di Kabupaten tersebut adalah berkisar antara 3,42 – 5,76.

Pendapatan dari Multiplier Effect Value

Multiplier effect adalah suatu perkiraan tentang kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan suatu permintaan baru dan menyebabkan timbulnya efek permulaan (Glasson, 1974 dalam Wiguna, 2014). Nilai *multiplier effect* dapat diperoleh dengan rumus:

$$K_j = S_j / S_{ij}$$

Keterangan:

K_j : nilai *multiplier effect* tahun j

S_j : PDRB sektor X di kabupaten Purworejo tahun j

S_{ij} : PDRB sub sektor Y di kabupaten Purworejo tahun j

Nilai *multiplier effect* merupakan perkiraan potensi kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam suatu wilayah. Nilai *multiplier effect* per sektor dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai *income multiplier effect* sektor kehutanan hanya sedikit meningkat dari 62,31 pada 2008 menjadi 64,74 pada 2012. Kenaikan ini lebih tinggi dari kenaikan sektor pertanian, meskipun masih lebih rendah dari sektor pertambangan dan galian yang meningkat hingga 5 poin selama kurun waktu yang sama. Meskipun demikian untuk seluruh sektor primer, nilai *Multiplier Effect Value* sektor kehutanan tetaplah yang tertinggi.

Tabel 3. Nilai Income Multiplier Effect sektor primer di Kabupaten Purworejo (2008-2012)

<i>Multiplier effect dari sektor</i>	<i>Income Multiplier Effect</i>				
	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Pertanian</i>	2.86	2.90	2.94	3.02	3.06
<i>Kehutanan</i>	62.31	62.47	62.29	62.96	64.74
<i>Pertambangan dan Galian</i>	47.04	49.89	50.38	51.33	52.49

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *income multiplier effect* sub sektor kehutanan pada tahun 2012 adalah 64,74 yang berarti setiap penambahan pendapatan sebesar Rp Y pada sub sektor kehutanan mengakibatkan penambahan sebesar 64,74 x Rp Y pada total PDRB kabupaten Purworejo.

Pola Pembangunan Sektor Kehutanan

Hasil analisis menggunakan klassen tipologi menunjukkan bahwa sektor kehutanan termasuk dalam sektor maju dengan nilai $R_{si} > R_{sn}$ dan $Y_{si} > Y_{sn}$ sehingga masuk dalam kuadran 1. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan sektor

kehutanan dalam PDRB Kabupaten Purworejo lebih besar dari tingkat pertumbuhan sektor kehutanan dalam PDRB Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Purworejo juga lebih besar jika dibandingkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah.

Untuk selengkapnya hasil analisis sektor dengan menggunakan *Klassen Typology* selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis *Klassen Typologi* untuk semua sektor di Kabupaten Purworejo

Tingkat Pertumbuhan Sektor	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB	
	$Ys_i \geq Ysn$	$Ys_i < Ysn$
$Rsi \geq Rsn$	<p>Kuadran 1: Sektor Maju</p> <p>1. Tanaman Pangan dan Non Pangan</p> <p>2. KEHUTANAN</p> <p>3. Jasa</p>	<p>Kuadran 3: Sektor Berkembang</p> <p>1. Perikanan</p> <p>2. Transportasi</p>
	$Rsi < Rsn$	<p>Kuadran 2: Sektor Tidak Berkembang</p> <p>1. Peternakan</p> <p>2. Pertambangan dan Galian</p> <p>3. Komunikasi</p> <p>4. Bank</p> <p>5. Jasa Bisnis</p> <p>6. Pemerintahan</p>

KESIMPULAN

Sektor kehutanan merupakan sektor basis bagi ekonomi Kabupaten Purworejo sepanjang 2008-2012. Hal ini diindikasikan dengan nilai LQ lebih dari 1 (satu), yang menunjukkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo lebih besar dari kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah.

Nilai *income multiplier effect* sektor kehutanan pada tahun 2012 adalah 64,74 yang berarti setiap penambahan pendapatan sebesar Rp Y pada sub sektor kehutanan mengakibatkan penambahan sebesar 64,74 x Rp Y pada total PDRB kabupaten Purworejo.

Hasil analisis Klassen Typology menunjukkan bahwa sektor kehutanan di Kabupaten Purworejo masuk dalam kuadran 1, sehingga dikategorikan sebagai sektor maju. Hal ini berarti pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo lebih besar dari pertumbuhan dan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah.

REFERENSI

- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Purworejo. 2014. Purworejo Dalam Angka 2013. Purworejo.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Purworejo. 2015. Purworejo Dalam Angka 2014. Purworejo.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Purworejo. 2016. Purworejo Dalam Angka 2015. Purworejo.
- Bappenas. 2017. Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999 – 2011. www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/15829/4692. Diakses tanggal 20 April 2017.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Purworejo. 2014. Data Produksi Kayu Tahun 2010-2013. Purworejo.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015. Purworejo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. 2013. Profil Daerah Kabupaten Purworejo 2013. Purworejo.
- Rahmat, M., Takahiro, F and Sato, N. 2012. Exploring the Role Of Forestry Sector On Economic System Of Gunungkidul District In 1993 – 2008. *Journal of Forestry Research Vol. 9 No. 2, 2012: 100-107*
- Richardson H.W. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Padang.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Wiguna, S. 2014. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Kabupaten Sumedang. Skripsi. Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.